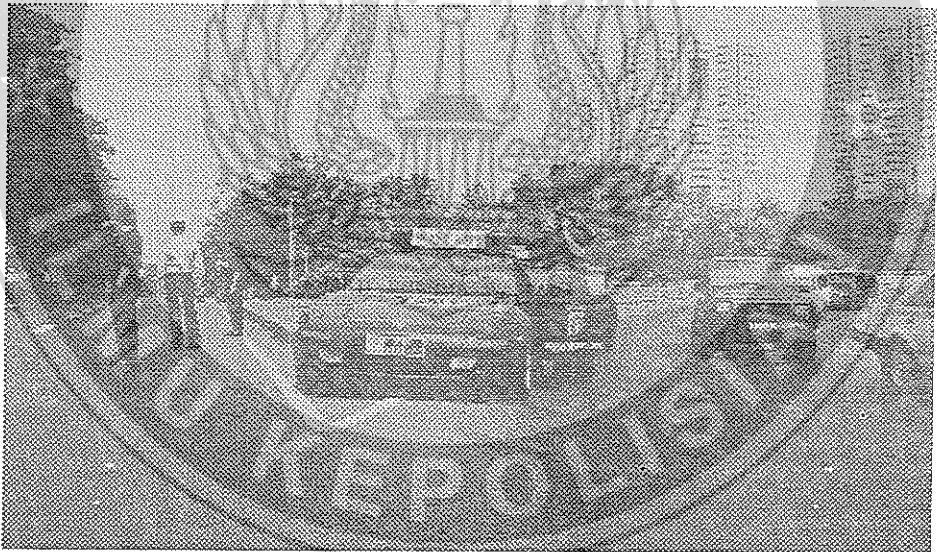
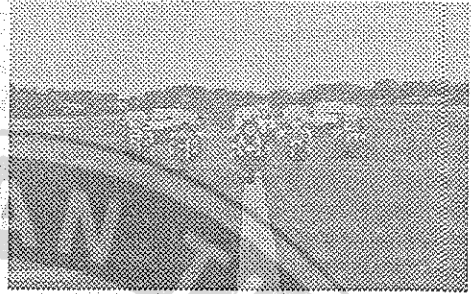


penguasa keadaan darurat.

4. Dalam keadaan darurat baik darurat sipil, darurat militer maupun darurat perang kesemuanya tetap melibatkan peran Polri selaku penanggung jawab di bidang keamanan dalam negeri.

Demikianlah makalah tentang peran Polri dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang dapat disajikan, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan tambahan referensi.



PARADIGMA SOSIO-POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN PERADABAN BANGSA (SUATU TINJAUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN NEGARA)

**Yth. Para Peserta Tanwir II Pemuda Muhammadiyah
serta Para Undangan, Hadirin yang berbahagia**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah S.W.T., karena atas berkah, rahmat dan hidayahnya, pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini.

Kepada saya, Panitia Tanwir meminta untuk menyampaikan ulasan tentang **Paradigma Sosio-Politik untuk mewujudkan peradaban bangsa** dalam aspek tinjauan sisi keamanan dan ketertiban negara.

Sudah barang tentu kesempatan yang disediakan ini, akan saya manfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan ulasan yang diminta, sekaligus pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa bangga atas prakarsa dan pemilihan topik-topik bahasan dengan tema **"Konsolidasi Gerakan Dalam Membangun Peradaban Bangsa"**, suatu wacana yang saya rasa sangat mulia, ditengah kancah kehidupan bangsa yang penuh dengan tarik menarik kepentingan sosio-politik dalam situasi yang kompleks dan permasalahan yang multi dimensional. Tentu dengan suatu keyakinan bahwa pemuda Muhammadiyah dengan populasi yang cukup besar dan kadar intelektual yang tinggi serta moderat dalam menyikapi permasalahan bangsa, akan dapat memberikan kontribusi nyata dan positif

untuk bersama-sama komponen bangsa yang lainnya membawa bangsa Indonesia keluar dari permasalahan-permasalahan besar secara utuh bersatu.

Para Peserta Tanwir yang berbahagia,

Reformasi yang telah bergulir sejak 1998 dampaknya belum membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis, bahkan kalau kita mau jujur menilai bahwa yang terjadi adalah semakin kompleksnya krisis yang terjadi.

Krisis kepercayaan yang melanda pemerintahan akibat kasus-kasus KKN, ketidakpekaan terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat, penetapan kebijakan yang tidak jelas, upaya pemulihan perekonomian yang lamban akibat ketergantungan yang luar biasa besar dari badan-badan ekonomi dunia, sampai kepada arogani kekuasaan yang mengarah kepada sistem kekuasaan yang bersifat birokratik-otoritarian. Tidak satupun diantara itu sudah terselesaikan secara tuntas kecuali sistem kekuasaan yang telah mulai lebih terbuka, wacana yang dikembangkan dibanyak institusi pemerintahan berupa perubahan paradigma yang mengarah kepada pelayanan masyarakat, kita harapkan segera pula diikuti dengan konkritisasi yang segera dapat pula dirasakan oleh masyarakat.

Krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatifpun sempat pula merebak dengan tudingan kurang pekanya lembaga ini terhadap aspirasi dan kondisi masyarakat. Demikian pula terhadap partai-partai politik yang dalam memperjuangkan aspirasinya dianggap hanya untuk kepentingan partai.

Tak kurang dari itu, terhadap lembaga penegak hukum juga tak luput dari berbagai tudingan yang mengarah kepada lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap aparaturnya sekaligus menipisnya harapan untuk memperoleh keadilan yang hakiki.

Para Hadirin Peserta Tanwir yang berbahagia,

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita dihadapkan pula dengan berbagai konflik, baik yang mengarah kepada upaya separatisme berupa keinginan untuk berdiri sendiri lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai-sampai kepada pertentangan etnis yang menelan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil. Penuntasan masalah-masalah inipun masih memerlukan tenaga, biaya dan waktu yang tidak singkat, itupun apabila masalah-masalah yang terjadi tidak bertambah lagi dengan permasalahan-permasalahan baru.

D bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, di samping upaya penegakkan hukum yang secara maksimal terus diupayakan, kegiatan-kegiatan untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat juga tetap dioptimalkan, walaupun kondisi keterbatasan sarana, prasarana serta anggaran selalu membayangi setiap langkah kegiatan yang dilakukan.

Namun yang lebih crucial dalam upaya penegakkan hukum ini adalah rendahnya kesadaran atau budaya hukum masyarakat yang menyebabkan potret hukum kita menjadi compang-camping. Bagaimana tidak apabila seroang pencuri ayam bisa dengan gampang digebuki sampai mati? Seorang pencuri motor dikeroyok ramai-ramai sampai tewas. Kantor polisi dirusak dan dibakar massa hanya karena polisi tidak mau melepas tersangka yang diminta massa? lalu dimana akal sehat kita untuk sekedar merenung apa betul bangsa kita ini bangsa yang beradab atau bangsa yang biadab, bangsa yang barbar, bangsa dengan hukum rimba siapa yang kuat dia yang menang?.

Banyak lagi hal yang bisa dirinci satu persatu untuk menambah panjang daftar inventaris permasalahan bagi kondisi keterpurukan bangsa ini. Sementara kita masih bertarung mengatasi berbagai permasalahan diatas, sementara pemerintahan menata diri dan bekerja keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara berbagai komponen bangsa memulihkan kesadaran diri akan pentingnya persatuan kesatuan dan upaya menjaga stabilitas agar pembangunan bisa berjalan dengan terencana, terarah dan berhasil, kita dikejutkan pula oleh tragedi WTC yang secara cepat membawa dampak kepada kondisi global. Rangkaian peristiwa WTC dan serangan Amerika Serikat serta sekutunya ke Afganistan, membawa keniscaayaan bagi terseretnya dunia dalam kondisi krisis global. Terorisme adalah tindakan yang harus diperangi oleh karena merupakan pelanggaran dan ancaman bagi kehidupan umat manusia. Namun upaya

memerangi terorisme tidak harus dilakukan secara membabi buta yang berakibat terjadinya pelanggaran dan ancaman bagi kehidupan umat manusia pula. Yang terjadi justru tidak hanya terorisme-terorisme baru, tetapi juga terjadi ketidakadilan global, kesewenang-wenangan negara super-power atas negara-negara miskin dan lemah yang pada gilirannya juga akan dibalas lagi oleh terorisme.

Dalam kondisi dimana kita masih belum mampu pulih dan bangkit mengatasi permasalahan bangsa sendiri, kepada kita dituntut untuk mampu menilik secara seksama perkembangan kondisi politik global dalam kaitan penentuan langkah-langkah antisipatif, termasuk kita mampu mengevaluasi secara kritis berbagai dampak yang mungkin akan mengimbas bagi kehidupan bangsa apabila kita tidak secara hati-hati menyikapi perkembangan politik global yang terjadi kini.

Beranjak dari hal-hal diatas, kiranya upaya untuk tidak kehilangan waktu dengan memanfaatkan setiap momentum dan peluang yang tidak selalu tersedia, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Segala potensi dan daya yang dimiliki harus dikerahkan guna mengejar ketertinggalan di berbagai aspek kehidupan. Potensi keberagaman etnis dan budaya jangan dipandang sebagai perbedaan yang mengancam kesatuan dan persatuan, melainkan harus dipandang sebagai khazanah pengaya bangsa yang multi etnik.

Sumber kekayaan alam yang melimpah hendaknya dipandang sebagai karunia Tuhan yang maha kuasa untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demikian pula permasalahan-permasalahan yang

terjadi hendaknya tidak dipandang sebagai petaka yang harus dihindari, melainkan sebagai cobaan Allah S.W.T. yang harus dihadapi, dicarikan penyelesaiannya dan dijadikan pengalaman sejarah bagi perjalanan bangsa kedepan.

Para Peserta Tanwir yang berbahagia,

Paradigma sosio-politik yang seharusnya terwujud, tampaknya tidak lepas dari peradaban bangsa yang hendak dibangun. Berbicara tentang peradaban bangsa, mari kita coba kaji apakah selama ini kita tidak memiliki peradaban bangsa ? Apakah kita tidak memiliki nilai-nilai luhur yang selama ini dijadikan kaidah dasar dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat ? Ataukah karena peradaban yang selama ini kita rasakan, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan sehingga harus berubah ? Pertanyaan-pertanyaan ini relevan untuk dijawab sebelum kita menetapkan paradigma sosio-politik dalam aspek tinjauan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tampaknya ada keengganan untuk membicarakan dasar negara Pancasila sebagai kaidah dasar peradaban bangsa. Hal ini bisa dimaklumi sebagai akibat dari dieksploitasinya Pancasila dalam berbagai kepentingan politik di era orde baru. Hal ini hendaknya disadari dan sekaligus dipahami sehingga kita tidak keliru dalam memetakan kaidah dasar peradaban bangsa. Peradaban bukan sesuatu perilaku yang dibentuk, melainkan sesuatu perilaku yang terbentuk, perilaku yang lahir dan berkembang secara alamiah sepanjang kehidupan manusia. perilaku yang bisa jadi membawa kekhasan tersendiri bagi suatu bangsa. Pancasila adalah kaidah dasar yang telah terbentuk sepanjang keberadaan manusia Indonesia yang mengenal per-

adaban, manusia Indonesia yang berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan, memiliki persatuan, kerakyatan dan berkeadilan sosial.

Paradigma sosio-politik dalam aspek keamanan dan ketertiban harusnya dibentuk dalam kerangka terwujudnya peradaban bangsa yang bertumpu kepada kelima sila dari Pancasila, karena paradigma sosio-politik yang menyimpang dan tidak mengarah kepada kaidah dasar Pancasila adalah pengingkaran dari hakiki peradaban bangsa yang berakibat sampai kapanpun juga tidak akan mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis yang terus berkepanjangan. Aspek keamanan dan ketertiban dalam paradigma sosio-politik menjadi sangat penting apabila kita menela'ah secara mendalam berbagai konstelasi politik dimana stabilitas menjadi amat berharga untuk diwujudkan.

Upaya mewujudkan stabilitas hendaknya tidak dianggap sebagai metoda atau model-pendekatan represif yang sering kali dianggap sah-sah saja di era orde baru. Paradigma Polri sejak dicanangkannya kemandirian berdasarkan ketetapan MPR No. VI tentang pemisahan TNI dan Polri serta ketetapan MPR No. VII tentang peran TNI dan Polri, lebih diarahkan sebagai "Abdi Masyarakat yang berfungsi dan berperan sebagai Pelindung dan Pelayan Masyarakat yang Profesional".

Upaya mewujudkan rasa aman dan terpeliharanya ketertiban bagi seluruh warga masyarakat tidak akan tercipta tanpa peran serta masyarakat. Tanggung jawab ini hendaknya disadari sebagai tanggung jawab bersama dimana Polri hanyalah institusi yang

memiliki legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan masyarakat memiliki pula legitimasi berdasarkan norma-norma moral dalam kehidupan kemasyarakatan.

Para Peserta Tanwir III Pemuda Muhammadiyah yang berbahagia, Hadirin Undangan Sekalian.

Saya memandang bahwa Tanwir ini adalah salah satu wujud dari kesadaran dan tanggung jawab yang besar dari Pemuda Muhammadiyah dalam menyikapi dan berupaya memikul beban permasalahan bangsa diberbagai bidang, termasuk tanggung jawab mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial politik bangsa, simbiosis upaya-upaya yang bersifat swakarsa dari para Pemuda Muhammadiyah dan kegiatan-kegiatan operasional kepolisian akan menjadi suatu sinergi bagi tumbuhnya stabilitas sebagai keniscayaan bagi terbangunnya paradigma sosio-politik bagi terwujudnya peradaban bangsa yang menjadi harapan kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Billahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, Oktober 2001

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Drs. S. Bimantoro
Jenderal Polisi